

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH SATPOL PP TERHADAP
PELACURAN DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN
2007**

(Tentang Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005)


*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2017

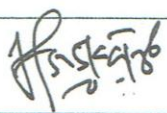

	No. Alumni Universitas	Resky Afrian Mukhlis	No. Alumni Fakultas	
	a) Tempat/Tgl Lahir	: Solok / 26 Mei 1995	f) Tanggal Lulus	: 26 Juli 2017
	b) Nama Orang Tua	: Mukhlis dan Syafriana	g) Predikat Lulus	: Dengan Sangat Memuaskan
	c) Fakultas	: Hukum	h) Ipk	: 3,33
	d) PK	: Hukum Pidana (PK IV)	i) Lama Studi	: 4 Tahun
	e) BP	: 1310112003		

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH SATPOL PP TERHADAP PELACURAN DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2007 (Tentang Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005) (Resky Afrian Mukhlis, 1310112003, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, Tahun 2017) ABSTRAK

Pelacuran yang merupakan suatu gejala sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Pelacuran juga memiliki istilah lain, yaitu prostitusi yang merupakan masalah dunia, umumnya setiap negara di dunia ada praktek prostitusi, dengan penyebab yang sama antara lain sama-sama mengalami masalah dalam ekonomi, sehingga memaksa mereka terlibat dengan aktivitas prostitusi. Dalam prostitusi, setidaknya ada dua hal yang ditemukan, yaitu seks dan uang. Cukup beralasan memang, mengingat kedua hal tersebut merupakan hal pokok dan wajib dalam praktik prostitusi. Keberadaan praktik prostitusi di Kota Padang dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan dan mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah setempat. Hal ini ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah ini berupa skripsi tentang pelaksanaan penegakan hukum oleh Satpol PP terhadap Pelacuran di Kota Padang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007, dimana masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Satpol PP Terhadap Pelacuran di Kota Padang Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007. 2) Apa yang menjadi Faktor Hambatan yang Dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menangani Kasus Pelacuran di Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di kantor Satpol PP Kota Padang. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Pelacuran yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang adalah dengan cara preventif non justicia (sosialisasi), represif non justicia (pembinaan), dan represif justicia (melalui sidang pengadilan). Sedangkan faktor hambatan yang dialami oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum adalah faktor internal, yaitu kendaraan yang minim, urangnya personil usia muda, dana operasional yang standar, dan keterbatasan alat. Seterusnya faktor eksternal, dimana tidak adanya undang-undang yang tegas mengatur tentang larangan pelacuran (dalam KUHP), merosotnya norma-norma kesusilaan dan agama, faktor ekonomi, dan kesulitan dalam koordinasi dengan lembaga hukum lainnya.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Juli 2017.

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H	Riki Afrizal, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana : Dr.A. Irzal Rias, S.H., M.H


Tanda Tangan

Tanda tangan alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :